

---

## PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INFLASI DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN POLEWALI MANDAR

**Rahmah Muin\***

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Al Asyariah Mandar  
rahmah\_muin@gmail.com

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar dan untuk mengetahui faktor apa yang berpengaruh dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar. Analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Dari hasil analisis diperoleh apabila Pertumbuhan Ekonomi meningkat satu persen maka akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 343.480.848, dengan asumsi bahwa variabel inflasi dan dana perimbangan adalah konstan. Kemudian jika inflasi naik satu persen maka akan menurunkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 12.435.858 dengan asumsi bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Dana perimbangan adalah konstan. Jika Dana Perimbangan ditambah seribu rupiah maka akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 0,030 ribu dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Variasi kemampuan variabel observasi dalam menjelaskan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebesar 91,2 persen, sisanya 8,8 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis satu yang menyatakan terdapat pengaruh parsial dan signifikan yakni faktor Dana Perimbangan, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar sebagian diterima sebagian ditolak.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah

### I. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sector swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Mudrajat, 2004:120). Tolak ukur dari keberhasilan pembangunan daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, stuktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk, antar daerah dan antar sektor. (Saragih, 2009 : 4)

Tujuan dari sebuah pembangunan adalah menciptakan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintahan Republik Indonesia harus bekerja ekstra keras dalam melaksanakan tugasnya. Sistem pemeritahan sentralistik kurang tepat diterapkan di Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas yang terdiri dari beribu-ribu pulau. Untuk mensiasatinya pada tahun 1999 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang tentang otonomi daerah yaitu UU No. 22 tahun 1999, ini merupakan langkah awal untuk mengganti system pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi (Suparmoko,2001)..

Perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar terlihat dengan naik turunnya target yang dicapai yakni di tahun 1997 dengan realisasi sebesar Rp. 1.471.641.000 ke tahun 1998 sebesar Rp. 1.322.081.000 dimana mengalami penurunan yaitu Rp. 149.560.000 atau sebesar 5,54 persen.

Kemudian di tahun 1999 realisasi yang dicapai sebesar Rp. 1.825.573.000 dimana mengalami peningkatan sebesar Rp. 503.492.000 atau sebesar 38,08 persen dan pada tahun 2000 peningkatannya hanya sebesar 27,83 persen atau sebesar Rp. 508.145.000 namun pada tahun 2001 terjadi peningkatan yang cukup tinggi yakni 73,95 persen atau sebesar Rp. 1.725.785.000 namun pada tahun 2002 realisasi yang dicapai masih cukup tinggi yakni sebesar Rp. 1.964.851.000 atau sebesar 48,40 persen lalu pada tahun 2003 realisasi yang dicapai hanya sebesar 22,59 persen atau sebesar Rp. 1.361.057.000.

Di tahun 2004 realisasi penerimaan hanya sebesar Rp. 316.575.000 atau sebesar 4,28 persen namun pada tahun 2005 kembali mengalami peningkatan target yakni sebesar Rp. 3.603.674.000 atau sebesar 46,78 persen dan di tahun 2006 realisasi yang dicapai hanya sebesar Rp. 558.486.000 atau sebesar 4,93 persen di susul pada tahun 2007 peningkatannya kecil hanya sebesar 3,10 persen atau sebesar Rp. 368.874.000.

Pada tahun 2008 realisasi PAD kembali meningkat yakni sebesar 35,68 persen atau sebesar Rp. 4.365.061.000 namun di tahun 2009 mengalami penurunan realisasi yakni sebesar 34,30 persen atau Rp. 5.693.572.000 dan pada tahun 2010 kembali mengalami peningkatan yang cukup tinggi yakni sebesar 55,64 persen atau Rp. 6.068.214.000 kemudian pada tahun 2011 peningkatannya hanya sebesar 24,12 persen atau Rp. 4.094.406.000.

Rata-rata perkembangan realisasi PAD Kabupaten Polewali Mandar dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2011 sebesar Rp. 8.871.302.330 atau sebesar 23,036 persen.

Diberlakukannya UU No.22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 mendorong daerah untuk berbenah dan menyiapkan diri untuk lebih mandiri karena selama ini daerah tidak dimungkinkan untuk mandiri, faktor yang menentukan mampu tidaknya suatu daerah untuk berotonomi yaitu kemampuan keuangan atau kapasitas dari potensi daerah. Artinya daerah otonom harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin , sehingga PAD harus menjadi bagian keuangan sendiri terbesar (Tambunan, 2001).

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar ?
2. Faktor apa yang berpengaruh dominan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar?

## II. Hasil Dan Pembahasan

### A. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar

Sebagaimana diketahui bahwa dalam penyelenggaraan rumah tangga daerah, selalu membutuhkan biaya yang cukup besar karena itu untuk mencakup keperluan penyelenggaraan rumah tangga daerah bersangkutan, maka dibutuhkan pembiayaan sebagaimana tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada setiap daerah, pendapatan asli daerah adalah pungutan yang dilakukan berdasarkan pendapatan daerah.

Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut, dan perkembangan di dalam menunjang pelaksanaan pembangunan serta jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Polewali Mandar berikut ini peneliti menyajikan data tentang perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2011. Tabel 1. Perkembangan realisasi pendapatan asli daerah kabupaten Polewali Mandar.

**Tabel 1. Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 1997 – 2011 (Dalam Rp. 000)**

Tahun	Realisasi (Dalam Rp.000)	Kenaikan / Penurunan (-)	
		Jumlah (Dalam Rp.000)	Persen
1997	1.471.641	-	-
1998	1.322.081	-149.560	-5,54
1999	1.825.573	503.492	38,08
2000	2.333.718	508.145	27,83
2001	4.059.503	1.725.785	73,95
2002	6.024.354	1.964.851	48,40
2003	7.385.411	1.361.057	22,59
2004	7.701.986	316.575	4,28
2005	11.305.660	3.603.674	46,78
2006	11.864.146	558.486	4,93
2007	12.233.020	368.874	3,10
2008	16.598.081	4.365.061	35,68
2009	10.904.509	-5.693.572	-34,30
2010	16.972.723	6.068.214	55,64
2011	21.067.129	4.094.406	24,12
<b>Jumlah</b>	<b>133.069.535</b>	<b>19.595.488</b>	<b>345,54</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>8.871.302,33</b>	<b>1.306.365,86</b>	<b>23,06</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar , 2012

Pada Tabel 1, perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar terlihat dengan naik turunnya target yang dicapai yakni di tahun 1997 dengan realisasi sebesar Rp. 1.471.641.000 ke tahun 1998 sebesar Rp. 1.322.081.000 dimana mengalami penurunan yaitu Rp. 149.560.000 atau sebesar 5,54 persen.

Kemudian di tahun 1999 realisasi yang dicapai sebesar Rp. 1.825.573.000 dimana mengalami peningkatan sebesar Rp. 503.492.000 atau sebesar 38,08 persen dan pada tahun 2000 peningkatannya hanya sebesar 27,83 persen atau sebesar Rp. 508.145.000 namun pada tahun 2001 terjadi peningkatan yang cukup tinggi yakni 73,95 persen atau sebesar Rp. 1.725.785.000 namun pada tahun 2002 realisasi yang dicapai masih cukup tinggi yakni sebesar Rp. 1.964.851.000 atau sebesar 48,40 persen lalu pada tahun 2003 realisasi yang dicapai hanya sebesar 22,59 persen atau sebesar Rp. 1.361.057.000.

Di tahun 2004 realisasi penerimaan hanya sebesar Rp. 316.575.000 atau sebesar 4,28 persen namun pada tahun 2005 kembali mengalami peningkatan target yakni sebesar Rp. 3.603.674.000 atau sebesar 46,78 persen dan di tahun 2006 realisasi yang dicapai hanya sebesar Rp. 558.486.000 atau sebesar 4,93 persen di susul pada tahun 2007 peningkatannya kecil hanya sebesar 3,10 persen atau sebesar Rp. 368.874.000.

Pada tahun 2008 realisasi PAD kembali meningkat yakni sebesar 35,68 persen atau sebesar Rp. 4.365.061.000 namun di tahun 2009 mengalami penurunan realisasi yakni sebesar 34,30 persen atau Rp. 5.693.572.000 dan pada tahun 2010 kembali mengalami peningkatan yang cukup tinggi yakni sebesar 55,64 persen atau Rp. 6.068.214.000 kemudian pada tahun 2011 peningkatannya hanya sebesar 24,12 persen atau Rp. 4.094.406.000.

Dan secara rata-rata perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2011 sebesar Rp. 8.871.302.330 atau sebesar 23,036 persen.

#### 1. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Polewali Mandar tahun 1997-2011.

Untuk menjelaskan pertumbuhan PDRB secara riil, digunakan PDRB harga konstan. PDRB harga konstan menggambarkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Polewali Mandar tanpa dipengaruhi oleh masalah perubahan harga atau inflasi yang terjadi atas barang dan jasa yang diproduksi, karena menggunakan harga konstan yakni harga tahun dasar. Untuk data tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 menggunakan tahun dasar 1993 dan data tahun 2001 sampai dengan tahun 2011 menggunakan tahun dasar 2000.

Ada beberapa pandangan secara teknis yang diperlukan sebagai letak belakang mengapa tahun 2000 dipilih sebagai tahun dasar perhitungan PDRB sektoral menggantikan tahun dasar 1993, adalah sebagai berikut :

1. Secara umum, perekonomian di berbagai wilayah di Indonesia selama tahun 2000 dipandang relative stabil.
2. Perkembangan ekonomi dunia dalam kurun waktu 1993 – 2000 yang diwarnai oleh globalisasi tentunya akan berpengaruh kepada perekonomian domestik. Masih dalam periode tersebut, pada pertengahan tahun 1997 terjadi krisis ekonomi yang juga berdampak pada perubahan struktur perekonomian di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk itu pemutakhiran tahun dasar perhitungan PDRB dari tahun 1993 ke tahun 2000 menjadi perlu dilakukan agar hasil estimasi PDRB sektoral maupun penggunaannya akan menjadi realistis, dalam pengertian mampu memberikan gambaran yang jelas terhadap fenomena pergeseran struktur produksi lintas sektor.
3. Menurut rekomendasi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagaimana tertuang dalam buku panduan “Sistem Neraca Nasional” dinyatakan bahwa estimasi PDRB atas dasar harga konstan sebaiknya dimutakhirkan secara periodik dengan menggunakan tahun referensi yang berakhiran 0 dan 5. Hal itu dimaksudkan agar besaran angka-angka PDRB dapat saling diperbandingkan antar wilayah bahkan antar negara dan antar waktu guna keperluan analisis kinerja perekonomian dunia.(BPS Kabupaten Polewali Mandar, 2005 : 5 - 6)

**Tabel 2. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Polewali Mandar Atas Dasar Harga Konstan Tahun 1997 – 2011 (Juta Rp)**

Tahun	PDRB (Juta rupiah)	Kenaikan / Penurunan (-)	
		Jumlah (Juta rupiah)	Persen
1997	379.217,96	-	7,85
1998	359.281,98	-19.935,98	-5,26
1999	369.859,75	10.577,77	2,94
2000	380.483,72	10.623,97	9,87
2001	854.352,49	473.868,77	4,57
2002	884.944,65	30.592,16	3,58
2003	916.874,41	31.929,76	3,61
2004	953.822,46	36.948,05	4,03
2005	1.003.313,22	49.490,76	5,14
2006	1.068.063,68	64.750,46	6,45
2007	1.136.043,80	67.980,12	6,41
2008	1.223.506,70	87.462,9	7,65
2009	1.226.104,82	2.598,12	4,92
2010	1.292.411,58	66.306,76	10,55
2011	1.428.757,95	136.346,37	9,68
<b>Jumlah</b>	<b>13.477.039,77</b>	<b>1.049.719,99</b>	<b>92,51</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>898.469,278</b>	<b>69.981,33</b>	<b>6,16</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar , 2012

Tabel 2, dapat diketahui bahwa PDRB Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp. 379.217.960 atau pertumbuhan ekonomi sebesar 7,85 persen dan pada tahun 1998 terjadi penurunan sebesar Rp. 19.935.980 atau sebesar 5,26 persen sebagai akibat dari krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 namun pada tahun 1999 kembali mengalami peningkatan yakni 2,94 persen atau sebesar Rp. 10.577.770 di susul tahun 2000 juga mengalami peningkatan sebesar 9,67 persen atau sebesar Rp. 10.623.970.

Pada tahun 2001 PDRB sebesar Rp. 854.352.490 atau mengalami pertumbuhan hanya sebesar Rp. 473.868.770 atau sebesar 4,57 persen demikian pula pada tahun 2002 pertumbuhan hanya sebesar 3,58 persen atau sebesar Rp. 30.592.160 dimana lebih rendah dari tahun sebelumnya. Tahun 2003 pertumbuhan sebesar 3,61 persen atau sebesar Rp. 31.929.760 dan pada tahun 2004 pertumbuhan sebesar 4,03 persen atau Rp. 36.948.050 disusul pada tahun 2005 pertumbuhan sebesar 5,14 persen atau sebesar Rp. 49.490.760 kemudian pada tahun 2006 pertumbuhan sebesar 6,45 persen atau sebesar Rp. 64.750.460. dengan demikian pertumbuhan ekonomi dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 terus mengalami peningkatan.

Tahun 2007 pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari tahun 2006 yakni sebesar 6,41 persen atau sebesar Rp. 67.980.120 dan tahun 2008 pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari

tahun 2007 yakni sebesar Rp. 87.642.900 atau sebesar 7,65 persen kemudian pada tahun 2009 kembali pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari tahun sebelumnya yakni 4,92 persen atau sebesar Rp. 2.598.120 kemudian pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan sebesar 10,55 persen atau sebesar Rp. 66.306.760 namun pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari tahun sebelumnya yakni sebesar 9,68 persen atau sebesar Rp.136.346.370.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Polewali Mandar dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2011 sebesar 5,81 persen atau sebesar Rp. 69.981.330 dimana pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2010 yakni sebesar 10,55 persen dan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 1998 dimana mengalami penurunan sebesar 5,26 persen atau sebesar Rp. 19.935.980.

## 2. Inflasi Kabupaten Polewali Mandar tahun 1997 – 2011.

Inflasi merupakan suatu gejala dimana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus-menerus. Kenaikan tingkat harga umum yang terjadi sekali waktu saja tidaklah dapat dikatakan sebagai inflasi. (Nanga, 2005 : 237)

Sukirno (2004 : 11) membedakan beberapa macam inflasi yaitu :

1. Inflasi merayap (inflasi yang terjadi sekitar 2 – 3 persen per tahun)
2. Inflasi sederhana (inflasi yang terjadi sekitar 5 – 8 persen per tahun)
3. Hiperinflasi (inflasi yang tingkatnya sangat tinggi yang menyebabkan tingkat harga menjadi dua kali lipat dalam tempo satu tahun). Inflasi di kabupaten Polewali Mandar dapat dilihat pada tabel 3.

**Tabel 3. Inflasi Kabupaten Polewali Mandar Tahun 1997 – 2011 (%)**

Tahun	Inflasi (%)
1997	8,24
1998	93,76
1999	5,13
2000	5,93
2001	5,93
2002	4,85
2003	4,39
2004	5,11
2005	8,89
2006	22,57
2007	1,67
2008	12,23
2009	10,66
2010	18,45
2011	6,00
<b>Jumlah</b>	<b>213,81</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>14,254</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar , 2012

Dari Tabel 3, dapat dilihat bahwa inflasi Kabupaten Polewali Mandar di tahun 1997 sebesar 8,24 persen dan pada tahun 1998 inflasi mengalami peningkatan yang cukup tajam yakni sebesar 93,76 persen hal ini disebabkan karna pada saat itu krisis ekonomi melanda bangsa Indonesia. Namun pada tahun 1999 mengalami penurunan yang juga cukup tajam yakni sebesar 5,13 persen kemudian pada tahun 2000 dan 2001 inflasi yang terjadi yakni sebesar 5,93 persen.

Di tahun 2002 dan 2003 inflasi kembali turun yakni sebesar 4,85 persen dan 4,39 persen kemudian pada tahun 2004 inflasi sebesar 5,11 persen di susul tahun 2005 yakni sebesar 8,89 persen dan pada tahun 2006 kembali inflasi mengalami peningkatan yakni sebesar 22,57 persen namun tahun 2007 juga kembali mengalami penurunan yakni sebesar 1,67 persen.

Dilanjutkan pada tahun 2008 inflasi mengalami peningkatan yakni sebesar 12,23 persen dan tahun 2009 turun sebesar 10,66 persen dan pada tahun 2010 naik sebesar 18,45 persen kemudian pada tahun 2011 kembali menurun sebesar 6,00 persen.

Dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata inflasi Kabupaten Polewali Mandar dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2011 sebesar 14,254 persen dimana inflasi tertinggi terjadi pada tahun 1998 yakni sebesar 93,76 persen dan inflasi terendah terjadi pada tahun 2007 sebesar 1,67 persen.

3. Dana Perimbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 1997– 2011.

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah, “Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. (Kuncoro : 2004 : 28)

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999 Pasal 6, dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

**Tabel 4. Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 1997 – 2011 (Dalam Rp. 000)**

Tahun	Realisasi (Dalam Rp. 000)	Kenaikan / Penurunan (-)	
		Jumlah (Dalam Rp.000)	Persen
1997	3.313.762	-	-
1998	4.865.756	1.551.994	46,83
1999	4.916.258	50.502	1,03
2000	7.578.753	2.662.495	54,15
2001	35.640.761	28.062.008	370,27
2002	170.468.455	134.827.694	378,29
2003	148.233.497	- 22.234.958	-13,04
2004	180.973.691	32.740.194	22,08
2005	213.819.097	32.845.406	18,14
2006	341.973.017	128.153.920	59,93
2007	374.386.078	32.413.061	9,47

2008	421.570.138	47.184.060	12,60
2009	440.679.595	19.109.457	4,53
2010	429.926.625	- 10.752.970	-2,44
2011	483.929.729	54.003.104	12,56
<b>Jumlah</b>	<b>3.262.275.212</b>	<b>480.615.967</b>	<b>974,4</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>217.485.014,13</b>	<b>32.041.064,46</b>	<b>64,96</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Polewali Mandar , 2012

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa realisasi dana perimbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 1997 sebesar Rp. 3.313.762.000 dan pada tahun 1998 realisasi dana perimbangan sebesar Rp. 4.865.756.000 atau naik sebesar Rp. 1.551.994.000 atau sebesar 46,83 persen kemudian pada tahun 1999 realisasi dana perimbangan kenaikannya hanya sebesar 1,03 persen atau sebesar Rp. 50.502.000 namun pada tahun 2000 realisasi dana perimbangan lebih tinggi dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 2.662.495.000 atau sebesar 54,15 persen dan disusul pada tahun 2001 dan tahun 2002 dimana mengalami peningkatan yang sangat tinggi yakni 370,27 persen dan 378,29 persen atau sebesar Rp. 28.062.008.000 dan Rp. 134.827.694.000.

Pada tahun 2003 realisasi dana perimbangan mengalami penurunan sebesar 13,04 persen atau sebesar Rp. 22.234.958.000 dan tahun 2004 realisasi dana perimbangan kembali mengalami peningkatan yakni sebesar 22,08 persen atau sebesar Rp. 32.740.194.000 kemudian pada tahun 2005 realisasi dana perimbangan naik hanya sebesar 18,14 persen atau Rp. 32.845.406.000 disusul pada tahun 2006 realisasi dana perimbangan kembali mengalami peningkatan yang tinggi yakni sebesar 59,93 persen atau sebesar Rp. 128.153.920.000.

Kemudian pada tahun 2007 realisasi dana perimbangan lebih rendah dari tahun sebelumnya yakni hanya 9,47 persen atau sebesar Rp. 32.413.061.000 dan pada tahun 2008 lebih tinggi dari tahun 2007 yakni 12,60 persen atau sebesar Rp. 47.184.060.000 lalu di tahun 2009 kembali lebih rendah dari tahun sebelumnya dimana hanya sebesar 4,53 persen atau sebesar Rp. 19.109.457.000 bahkan pada tahun 2010 mengalami penurunan sebesar 2,44 persen atau sebesar Rp. 10.752.970.000 dan tahun 2011 kembali meningkat sebesar 12,56 persen atau sebesar Rp. 54.003.104.000.

Dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata realisasi dana perimbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 1997 sampai dengan tahun 2011 sebesar Rp. 32.041.064.460 atau sebesar 64,96 persen dimana realisasi dana perimbangan tertinggi berada pada tahun 2002 yakni sebesar Rp. 134.827.694.000 atau sebesar 378 persen dan terendah terjadi pada tahun 2003 dimana mengalami penurunan sebesar 13,04 persen atau sebesar Rp. 22.234.958.000.

## Hasil Uji Penyimpangan

### 1. Hasil Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS maka VIF Pertumbuhan Ekonomi adalah 1,173, VIF Inflasi adalah 1,055 dan VIF Dana Perimbangan adalah 1,229. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masalah multikolinearitas antara variabel bebas yakni Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Dana Perimbangan bebas dari multikolinearitas yang ditunjukkan dengan nilai *tolerance* > 0,10 atau nilai VIF < 10 dapat diabaikan karena VIF berada di antara 0,10 dengan 10.

### 2. Hasil Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diperoleh data Hasil Uji Autokorelasi dapat dilihat pada tabel 5 berikut.

**Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.955 <sup>a</sup>	.912	.887	2.09073E6	2.163

a. Predictors: (Constant), Dana perimbangan, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi

b. Dependent Variable: PAD

**Model Summary<sup>b</sup>**

*Sumber : hasil uji dengan SPSS 16*

Berdasarkan nilai DW 2,163 berarti tidak ada autokorelasi.

3. Hasil Uji Heteroskedisitas

Berikut ini tabel 6, merupakan hasil uji heteroskedasitas dengan menggunakan SPSS 16.

**Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedisitas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 Constant	381235.192	1.562E6		.244	.812
Pert, Ek	343480.848	246191.280	.136	1.395	.190
Inflasi	-12435.858	25288.895	-.045	-.492	.633
Dana Perimb'	.030	.003	.885	8.901	.000

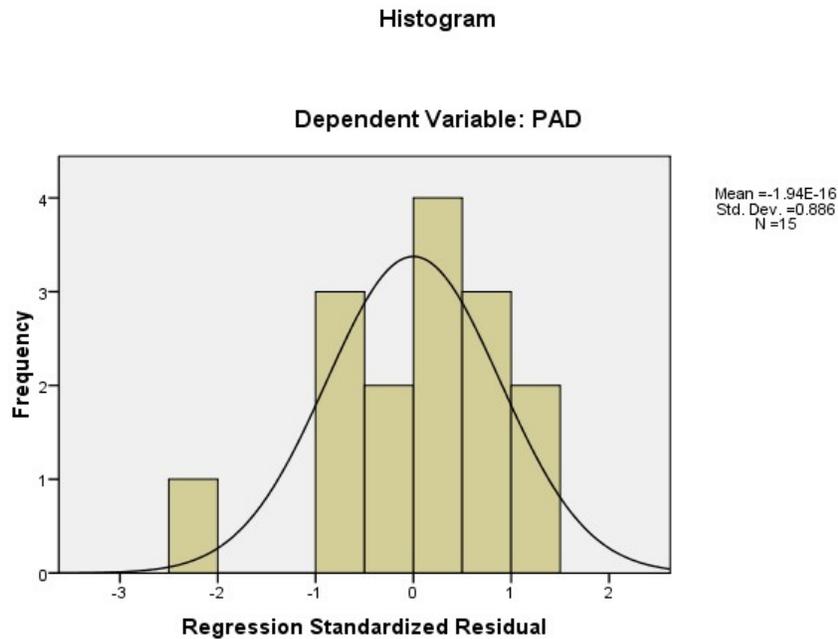
a. Dependent Variable: PAD

*Sumber : hasil uji dengan SPSS 16*

4. Hasil Uji Normalitas

Dari Hasil Uji Normalitas dengan menggunakan SPSS 16, maka diperoleh gambar 1 berikut.

Gambar 1. Grafik Distribusi Normal Variabel Pengganggu

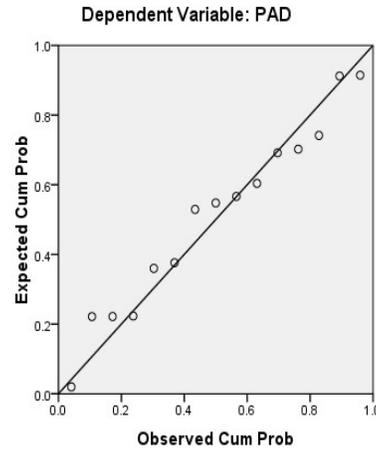


Berdasarkan tampilan grafik histogram (dapat dilihat pada Gambar 1), dapat disimpulkan bahwa variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Berdasarkan dari histogram di atas, menunjukkan pola regresi normal yang memenuhi asumsi normalitas karena histogram yang ada menyerupai lonceng (mendekati pola distribusi normal).

Sedangkan berdasarkan grafik normal plot (dapat dilihat pada Gambar 2), dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

**Gambar 2. Grafik Normal Plot**

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal tersebut.

Berdasarkan Uji Normalitas menggunakan analisis non – parametric Kolmogorof – Smirnov (K-S), diperoleh hasil bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi mempunyai tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut terdistribusi secara normal.

1. Pengujian Hipotesis

Hasil analisis dan pengujian hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Uji Serentak (Uji F)

Berdasarkan Uji – F diperoleh pengaruh secara bersama-sama tiga variabel independen Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Dana Perimbangan terhadap variabel dependen Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

**Tabel 6. Uji F**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	4.953E14	3	1.651E14	37.768	.000 <sup>a</sup>
Residual	4.808E13	11	4.371E12		
Total	5.434E14	14			

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	4.953E14	3	1.651E14	37.768	.000 <sup>a</sup>
Residual	4.808E13	11	4.371E12		
Total	5.434E14	14			

a. Predictors: (Constant), Dana perimb, Inflasi, Pert' Ek

b. Dependent Variable: PAD

Sumber : hasil olahan dengan SPSS 16

Dari hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai F hitung sebesar 37,768 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, dengan demikian nilai P (sig) = 0,001 <  $\alpha$  0,005. Kemudian F hitung > F tabel (37,768 > 4,53) dan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian secara serentak dapat disimpulkan Pertumbuhan Ekonomi (X1), Inflasi (X2) dan Dana Perimbangan (X3) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

*Adjusted R<sup>2</sup>*

Berdasarkan tampilan SPSS model summary diperoleh hasil bahwa nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,912, hal ini berarti 91,2 persen variasi Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Dana Perimbangan. Sedangkan sisanya sebesar 8,8 persen dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model.

**Tabel 7. Adjusted R<sup>2</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.955 <sup>a</sup>	.912	.887	2.09073E6

a. Predictors: (Constant), Dana perimbangan, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi

b. Dependent Variable: PAD

Sumber : hasil olahan dengan SPSS 16

b. Uji Partial (Uji t)

Sementara itu secara parsial pengaruh dari tiga variabel independen tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah dipaparkan pada tabel berikut.

**Tabel 8. Uji Partial (Uji t)**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 Constant	381235.192	1.562E6		.244	.812
Pert, Ek	343480.848	246191.280	.136	1.395	.190
Inflasi	-12435.858	25288.895	-.045	-.492	.633
Dana Perimb	.030	.003	.885	8.901	.000

a. Dependent Variable: PAD

Coefficients<sup>a</sup>

Sumber : Hasil Uji SPSS 16

Dari Tabel 5.10 dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$PAD = 381.235,192 + 343.480,848X_1 - 12.435,858X_2 + 0,030X_3 + e$$

Nilai t : (1,395) (-0,492) (8,901)

Sig : (0,190) (0,633) (0,000)

$$R = 0,955^a = 95,5\%, R^2 = 0,912 = 91,2\%, F^{hit} = 37,671, Sig = 0,000^a$$

Berdasarkan persamaan regresi berganda dari hasil pengolahan data SPSS 16, maka dapat dijelaskan bahwa :

1. Apabila Pertumbuhan Ekonomi meningkat satu persen maka di estimasi Pendapatan Asli Daerah naik sebesar Rp. 343.480.848, dengan asumsi bahwa variabel inflasi dan dana perimbangan adalah konstan. Nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel Pertumbuhan Ekonomi diperoleh 1,395 dengan nilai signifikansi 0,190 menunjukkan bahwa nilai t yang diperoleh tersebut tidak signifikan karena nilai signifikan yang diperoleh lebih dari 0,05. Hal ini berarti bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi ( $X_1$ ) memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Temuan ini memberikan indikasi bahwa besarnya Pertumbuhan Ekonomi ditentukan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah. Pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Polewali Mandar.

Faktor utama bagi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan investasi yang dapat dilakukan diantaranya dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai, baik kualitas maupun kuantitas dan menciptakan kepastian hukum. Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah, Pemda dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya

adalah memberikan proporsi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah (Harianto dan Adi, 2007).

2. Jika inflasi meningkat satu persen maka di estimasi Pedapatan Asli Daerah turun sebesar Rp. 12.435.858 juta dengan asumsi bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Dana perimbangan adalah konstan. Nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel Inflasi diperoleh  $-0,492$  dengan nilai signifikansi  $0,633$  menunjukkan bahwa nilai  $t$  yang diperoleh tersebut tidak signifikan karena nilai signifikansi yang diperoleh lebih dari  $0,05$ . Hal ini berarti bahwa variabel Inflasi ( $X_2$ ) memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap Pedapatan Asli Daerah.

Tingkat inflasi di Kabupaten Polewali Mandar mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Dalam kurun waktu 1997 sampai dengan 2011, tingkat inflasi yang paling tinggi yang pernah terjadi di Kabupaten Polewali Mandar adalah pada tahun 1998, yaitu mencapai  $93,76$  persen. Tingkat inflasi ini menunjukkan keadaan ekonomi yang sangat parah, dimana harga-harga mengalami kenaikan yang sangat drastis. Banyak perusahaan / industri yang terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja dikarenakan biaya operasional yang sangat tinggi yang harus mereka tanggung, baik biaya modal kerja yang dikarenakan tingginya bunga kredit dan biaya lain yang diperlukan untuk melakukan produksi atau menjalankan usahanya. Sebagai akibatnya bertambahnya pengangguran, pendapatan riil masyarakat menjadi sangat menurun bahkan sulit untuk berkelola. Para pengusaha juga kesulitan atau enggan untuk membuka lapangan usaha baru, karena biaya yang dibutuhkan sangat besar. Bagi mereka yang memiliki dana, lebih memilih menyimpan dananya di bank daripada membuka usaha, karena dengan demikian mereka tidak mengambil resiko kerugian. Sektor perbankan juga mengalami keterpurukan pada masa ini, dimana banyak bank yang harus dilikuidasi.

3. Jika Dana Perimbangan meningkat seribu rupiah maka di estimasi Pedapatan Asli Daerah naik sebesar Rp.  $0,030$  ribu dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Nilai  $t_{hitung}$  untuk variabel Dana Perimbangan diperoleh  $8,901$  dengan nilai signifikansi  $0,000$  menunjukkan bahwa nilai  $t$  yang diperoleh tersebut signifikan karena nilai signifikansi yang diperoleh kurang dari  $0,05$ . Hal ini berarti bahwa variabel Dana Perimbangan ( $X_3$ ) memiliki hubungan yang signifikan terhadap Pedapatan Asli Daerah.

Temuan ini memberikan indikasi bahwa besarnya Pendapatan Asli Daerah sangat ditentukan oleh faktor Dana Perimbangan. Belanja Pegawai memberikan dampak yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah yang mempunyai dampak nyata terhadap kenaikan pajak daerah yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah.

Dalam era desentralisasi fiskal sekarang ini, diharapkan adanya peningkatan pelayanan di berbagai sektor terutama sektor publik, dengan adanya peningkatan dalam layanan di sektor publik dapat meningkatkan daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya di daerah. Oleh karena itu, pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemda dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik yang dapat dilakukan dengan peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya. Dengan meningkatnya pengeluaran modal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik karena hasil dari pengeluaran belanja modal adalah meningkatnya aset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik oleh Pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil ini maka hipotesis satu yang menyatakan terdapat pengaruh parsial dan signifikan yakni faktor Dana Perimbangan, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap Pedapatan Asli Daerah Kabupaten

Polewali Mandar atau dengan kata lain ketiga variabel tersebut sebagian diterima sebagian ditolak.

Berdasarkan lampiran hasil uji SPSS 16 menunjukkan bahwa hasil pengujian hipotesis dengan perhitungan uji F diperoleh  $F$  - hitung = 37,671 dengan nilai signifikansi 0,000. Karena nilai signifikansi kurang dari 0,05, menunjukkan bahwa nilai  $F$  - hitung yang diperoleh tersebut signifikan. Dengan demikian secara bersama-sama terdapat hubungan simultan yang signifikan antara Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan hasil ini maka hipotesis satu yang menyatakan terdapat pengaruh simultan dan signifikan antara faktor Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah diterima. Hal ini ditunjukkan pula dengan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 91,2% yang berarti bahwa jumlah Pendapatan Asli Daerah ditentukan oleh ke - 3 variabel independen tersebut, sedangkan sisanya 8,8% ditentukan oleh faktor lain yang tidak masuk dalam model ini.

Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi dan Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama atau simultan dapat diketahui dari nilai korelasi secara simultan atau  $R$  sebesar 95,5%.

Hipotesis dua yang menyatakan bahwa variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar adalah variabel Dana Perimbangan diterima, oleh karena dari hasil analisis ditemukan bahwa variabel yang paling dominan pengaruhnya adalah Dana Perimbangan ( $X_3$ ) yang ditunjukkan dengan koefisien 0,030.

### III. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar.  
Digambarkan dari hipotesis yang telah diuji dengan indikasi bahwa Pertumbuhan Ekonomi memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan hasil hubungan yang tidak signifikan yang ditunjukkan dengan nilai  $t$  sebesar 1,395 dan nilai Sig 0,190.
2. Pengaruh Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar.  
Digambarkan dari hipotesis yang telah diuji dengan indikasi bahwa Inflasi memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan hasil hubungan yang tidak signifikan yang ditunjukkan dengan nilai  $t$  sebesar -0,492 dan nilai Sig 0,633.
3. Pengaruh Dana perimbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar.  
Digambarkan dari hipotesis yang telah diuji dengan indikasi bahwa Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan hasil hubungan yang signifikan yang ditunjukkan dengan nilai  $t$  sebesar 8,901 dan nilai Sig 0,000.
4. Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar adalah variabel Dana Perimbangan yang ditunjukkan dengan nilai  $B$  sebesar 0,030.

## Daftar Pustaka

- Anonim, Undang-undang No. 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 1997 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- , Undang-undang No. 33 Tahun 2004, *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*
- Muana Nanga, 2005, *Makro Ekonomi, Teori, Masalah dan Kebijakan*, Edisi Kedua, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mudrajat Koncoro, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Sadono Sukirno, 2008, *Makro Ekonomi, Teori Pengantar*, Edisi Ketiga, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2010, *Ekonomi Pembangunan Edisi Kedua*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Samuelson Nordhaus, 2004, *Ilmu Makroekonomi*, Edisi Tujuh Belas, Penerbit PT. Media Global Edukasi, Jakarta.
- Saragih, 2009, *Analisis Pengaruh PAD terhadap PDRB Kabupaten Dairi*, Universitas Sumatera Utara.
- Santoso. 2005. *Statistik Parametrik*. Penerbit Elex Media Computindo. Jakarta.